

Judul : Kuota Haji Jabar Anjlok, nasib 882 Calhaj belum jelas nih
Tanggal : Minggu, 16 November 2025
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Kuota Haji Jabar Anjlok Nasib 882 Calhaj Belum Jelas Nih



Maman Imanulhaq

KEBIJAKAN Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) memangkas masa tunggu haji menjadi rata-rata 26 tahun untuk seluruh provinsi di Indonesia pada 2026, mulai berdampak. Kuota haji sejumlah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat (Jabar) ikut dipangkas.

Kabupaten Subang mengalami dampak besar pengurangan kuota haji. Dari 1.126 jemaah pada tahun 2025 menjadi hanya 244 jemaah pada tahun 2026, atau berkurang sebanyak 882 orang. Begitu juga Kabupaten Sumedang dari 511 orang pada 2025 menjadi 72 orang pada 2026. Yang paling parah Kota Banjar, dari sebelumnya 220 orang, menjadi hanya 10 orang pada 2026.

Anggota Komisi VIII DPR Maman Imanulhaq mengatakan, kebijakan menyamaratakan masa tunggu haji menjadi 26 tahun merupakan bagian dari reformasi sistem waiting list nasional. Tujuannya, agar lebih efisien dan adil. Tapi penerapannya dinilai terlalu tergesa-gesa sehingga menimbulkan keresahan di masyarakat, terutama di Jabar.

"Pemerintah harus memberi waktu adaptasi dan melakukan komunikasi publik yang intensif," saran Maman dalam keterangannya, Sabtu (15/11/2025).

Maman mengatakan, jika diberlakukan mulai tahun 2027, masyarakat akan lebih siap dan tidak terjadi kegelisahan. Perubahan besar semacam ini seharusnya disertai sosialisasi, koordinasi dan masa transisi yang memadai. Tujuannya, agar masyarakat tidak kehilangan kepercayaan terhadap tata kelola haji nasional.

Komisi VIII DPR, kata Maman, mendukung penuh reformasi penyelenggaraan ibadah haji yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Tapi pelaksanaannya harus disesuaikan dengan kesiapan teknis dan sosial di lapangan.

Menurutnya, menjaga kepercayaan umat terhadap tata kelola haji nasional. Sebab haji adalah ibadah suci yang melibatkan pengorbanan besar.

"Negara dan Kemenhaj wajib memastikan setiap kebijakan dijalankan dengan asas keadilan, transparansi, dan keberpihakan pada umat," tandas Maman.

Terkait keinginan Bupati Subang agar kuota haji di wilayahnya dikembalikan ke semula, Maman mendukung langkah tersebut. Keberatan itu wajar sebagai bentuk kepedulian terhadap warganya dan perlu dijadikan bahan evaluasi oleh Kemenhaj.

"Kami (Komisi VIII DPR) akan menindaklanjutinya dengan meminta penjelasan resmi dari Kemenhaj," ujar legislator asal Majalengka, Jabar ini.

Sebelumnya, Bupati Subang Reynaldi Putra Andita Budi Raemi melayangkan surat resmi kepada Menteri Haji dan Umrah yang berisi keberatan atas penetapan kuota haji 2026. Dalam surat itu, dia meminta agar kuota dikembalikan ke jumlah semula, atau setidaknya dilakukan penyesuaian bertahap yang lebih manusiawi. ■ TIF